

**ETIKA:  
Keamanan Berpolitik dan Ber-New Media**

*Nunung Prajarto\**

*Abstract*

*The improvement of security in politics and new media calls for fast action. Recent cases indicate that political position and rights to communication using new media cannot be guaranteed due to the problem of security. The reasons rest on the way the people get into politics and the aims they use new media. The following article explores how ethics may solve the problem of security, starting from ethics in democracy, politics, and new media, the causes of ethics violations, and attitudes for coping with security problems.*

**Kata-kata kunci:**

*Etika, keamanan, politik, new media*

**Pendahuluan**

Satu perkara yang sama-sama tidak mampu dijamin bersama oleh dinamika politik dan *new media* terletak pada isu keamanan. Bahkan di negeri yang konon diagitasikan dengan 'aman, damai, dan sejahtera' ini, persoalan keamanan harus tetap dinegosiasikan. Terlepas dari berbagai kepentingan yang menyertai, jaminan keamanan berpolitik dan ber-

---

\* *Nunung Prajarto* adalah Guru Besar pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui email: yanpraz@yahoo.com.

*new media* ini perlu ditegascermatkan karena dampak politiknya sangat lugas mengena kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Secara sederhana, sejumlah contoh aktual telah menunjukkan tidak amannya hidup dalam dunia politik di Indonesia. Pencapaian posisi puncak seakan berjalan paralel dengan keterlemparan ke jurang terdalam, meskipun alasan 'demi partai' atau 'demi negara' kerap dipakai sebagai *excuses* untuk membenamkan karir politik seseorang. Di sisi yang sama, pola berpolitik kekanak-kanakan memperparah keadaan, "Jika aku disudutkan, aku akan membongkar semua kebobrokan."<sup>1</sup> Kata kuncinya memang terletak pada etika berpolitik yang harus ditanamjivakan secara integratif dalam tata kelola partai politik dan perilaku anggota-anggotanya (Critchley, 2008; dan Gutmann dan Thompson, 2005). Saat etika politik tak lagi dijunjung tinggi, keamanan berpolitik pun menjadi barang berharga mahal.

Kongruen dengan hal di atas, keamanan dalam ber-*new media* pun terbaring pada masalah etika dalam bermedia. Penetrasi media secara masif berulang kali mengabaikan masalah etika dalam relasi antarpublik serta antara publik dan medianya. Meskipun seleksi status ekonomi dalam mengakses teknologi informasi, sebagai contoh, telah digantikan oleh seleksi formal registrasi, tetap saja keamanan dalam ber-*new media* harus disambungrapatkan dengan etika pemanfaatannya (Day, 2005; Ess, 2009; dan Wilkins dan Christian, 2008). Registrasi *aces* di Indonesia dalam kenyataannya masih mengandung kelemahan dari sisi tanggung jawab dan akurasinya, ketika proses registrasi bisa dilakukan siapa saja dan dengan tanda pengenal siapa saja.<sup>2</sup>

---

1 Bandingkan dengan seorang anak yang tertangkap mencuri jambu tetangga dan kemudian si anak mengumbar "A juga mencuri, B ikut mencuri, dan C pernah mencuri".

2 Pada awalnya, izin pemilikan lebih didasari hasil observasi kelayakan terhadap rekening, NPWP, dan bukti setoran. Hal ini kemudian diperbarui dengan kewajiban melakukan registrasi sesuai tanda pengenal identitas untuk alasan keamanan. Namun demikian formalitas registrasi ini tidak disertai keketatan prosedur sehingga memungkinkan terjadinya pemalsuan data. Bandingkan dengan registrasi di beberapa negara yang lebih tertib, yang mensyaratkan agen penjualan terdaftar saja yang berhak membantu proses registrasi dan harus disertai bukti identitas resmi.

Etika dalam berpolitik dan ber-*new media* inilah yang, jika disepakati, perlu dibenahi untuk menyisihkan kesemena-menaan sehingga pada gilirannya mampu memberi jaminan keamanan bagi individu, kelompok, dan masyarakat di dalamnya. Secara hipotetik konseptual, implementasi etika berpolitik dan ber-*new media* akan berimbas pada terciptanya keamanan atau kepastian, yang secara operasional dapat ditelusuri dari uraian pada sub-bagian berikut ini.

### **Demokrasi, Politik, dan *New media***

Tingkat keterjaminan *rights to*, *rights for*, dan *rights from* menjadi penentu keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan demokrasi di suatu negara (Frantzich, 2008). Nyaris tidak ada sebuah negara yang secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai negara demokratis, namun bertindak abai terhadap *Ketiga* jenis *rights* ini. Amerika Serikat dan Kanada, Inggris dan Jerman, Australia dan Selandia Baru, serta India dan Indonesia, dapat dicontohkan dalam hal upaya pemenuhan hak-hak ini. Bahkan pada negara-negara yang selama ini masih diberi cap merah untuk kehidupan demokrasinya, layanan terhadap *rights* ini, tentu dalam tingkat yang variatif, tetap berusaha diberikan. Cina, Kuba, dan Korea Utara menjadi contoh dari negara-negara komunis yang pada tingkatan tertentu tetap memberikan layanan pada hak warga negara mereka.

Demokrasi, dengan sendirinya, dapat dipandang sebagai pilihan maksimal bila penjaminan *rights* kepada warga negara terbilang sempurna. Demokrasi menjamin warga negara untuk menikmati hak politik dan hak ekonomi-sosial-budayanya, selain hak-hak untuk bebas dari rasa takut, bebas beragama, dan kebebasan-kebebasan lain yang terjamin dalam hak-hak asasinya (Sirianni, 2008). Penegakkan demokrasi pula yang kemudian disakralkan dan diposisikan sebagai 'kata suci' dalam setiap gerakan sosial politik melawan kejenuhan terhadap kehidupan yang cenderung stagnan.

Mimpi-mimpi demokrasi inilah yang di sejumlah tempat menciptakan ruang-ruang demokrasi untuk bergerak dan, sayangnya, secara tak disadari atau memang disengaja kadang-kadang justru membuka peluang terjadinya *democracy laundering*. Tidak ada ubahnya dengan menabur *democracy seeds* hanya untuk dimasukkan ke *launderette*. Tak berbeda jauh dengan *bleaching* demokrasi untuk suatu kehidupan

bernegara yang pada dasarnya rawan paksaan. Sama halnya dengan menyelipkan api ke dalam sekam, walaupun kadang ditutupi dengan, sekali lagi, mimpi tentang berjalannya kehidupan dan penegakan demokrasi di dalam masyarakat.

Kendali terhadap implementasi substansi demokrasilah yang layak diupayakan agar demokrasi tidak sekadar 'mimikri' dari bentuk aneh relasi antarwarga dalam suatu negara. Kepatuhan pada aturan, ketaatan, kedewasaan dalam menikmati *rights*, dan penghormatan pada hak orang lain menjadi hal-hal mutlak agar persoalan keamanan terjaga dengan sendirinya. Secara jelas, kesetaraan *human rights* dan *human duties* menjadi landasan dari kesetaraan dalam kehidupan demokrasi yang mengantar pada ekualitas hak dengan "*inalienable rights, among which are life, liberty and the pursuit of happiness*" (Clancy, 2011).

Hal-hal yang mengarah pada upaya menjamin ekualitas hak dan ekualitas kewajiban inilah yang dapat dijabarkan dan diterjemahkan sebagai etika dalam demokrasi (Duggan, 2004; dan Saphiro, 2004). Kesediaan mematuhi aturan akan dirasakan aman, sebagai misal, bila hal ini dilakukan juga oleh semuanya, sehingga tidak memunculkan perasaan atau penilaian 'dikorbankan'. Artinya, butir *codes of conduct* tentang hal ini harus dipatuhi secara sama dan mengandung jaminan kepastian bahwa akan diberlakukan secara sama. *Codes to* dan *codes for* yang termaknai dari sejumlah *code of conduct* menjadi energi penyeimbang dan sekaligus kekuatan untuk beretika dalam pencapaian ekualitas (Svara, 2006; dan Niebuhr, 2002).

Permasalahan memang tidak sesederhana rumusan normatif yang dieksplisitkan. Etika tak sekadar acuan dan pengingat yang tertempel di dinding atau diselipkan di halaman terakhir buku tanda keanggotaan. Etika juga tak hanya teruji ketika suatu kasus pelanggaran dilakukan dan orang beramai-ramai kemudian menggugatnya. *Pertama*, pada titik tertentu etika layak dikontestasikan pada motif moral orang-orang yang menggugat dan membela (Niebuhr, 2002). Titik ini dengan sendirinya mengantar pada persoalan utama tentang pertentangan antara jaminan kebebasan berpendapat-berekspresi dan motif moral untuk menjalankan penegakan etika. Sekaligus terlihat bahwa sosialisasi etika kerap menjadi persoalan tersendiri dalam meniadakan formalitas etika.

*Kedua*, persoalan uji etika kerap pula harus terungkit saat pengecualian dituntut atau dimintakan pelanggarnya dan bahkan mendapatkan jaminan baik secara tersurat maupun tersirat. Bahwa etika hanya perangkat yang selayaknya dipatuhi berdasar kepatutan profesi tak sepenuhnya salah. Namun demikian, jaminan upaya untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran etika yang sekaligus tindak pelanggaran pidana secara tidak langsung membuat individu tak segan-segan melakukan pelanggaran etika (Green, 2007). Pada satu tingkat, kebijakan penyelesaian persoalan etika ke ranah etika dan persoalan hukum ke ranah hukum merupakan bentuk proporsional penyelesaian masalah. Satu hal yang menjadi masalah, dan ini menjadi persoalan berikut dalam kaitannya dengan etika, adalah keraguan terhadap sifat kontributif penegakan etika untuk penyelesaian masalah hukum dan bukan sekadar untuk memilahkan persoalan atau justru untuk mengaburkan permasalahan (Williams dan Arrigo, 2007).

Gelagat persoalan *Ketiga* dalam penegakan etika untuk mengarah pada ekualitas warga negara muncul dan berulang-ulang muncul saat terjadi pembiaran terhadap pelanggaran. Sifat masif pelanggaran secara psikis memicu individu lain untuk melakukan pelanggaran dan menyulap pelanggaran menjadi suatu kebiasaan. Jelas dalam hal ini, pembiaran pelanggaran etika tak lagi menjadi penjamin tercapainya ekualitas sebagai syarat utuh demokrasi. Alih-alih memberi jaminan bagi pihak eksternal, menjadi penjamin bagi satuan organisasi atau komunitas sendiri pun sudah harus dipandang gagal.

Tentunya, resistensi pada etika tak terbatas pada terganggunya kenyamanan individual atau kelompok. Kepentingan untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan sebagai suatu *shortcut* perbesaran organisasi –dalam berdemokrasi– acap menjebak pada tindakan-tindakan kontra etika yang justru melahirkan posisi rentan dalam suatu proses universalitas hegemoni bernama politik. Saat kedai politik dibuka oleh suatu partai, wajib saji barang dagangan utamanya tak lain adalah kepercayaan terhadap karakter partai yang dari saat ke saat akan dijelmakan dalam bentuk program (Hetherington, 2006; Herreros, 2007; dan Rexroth, 2003). Masalah kepercayaan inilah yang secara rasional seharusnya kausatif terhadap pilihan orang, meskipun harus diakui ritme politik bisa saja ditentukan oleh sikap ikut-ikutan, jebakan pada figur yang mengarah

pada pengultusan, atau perlawanan terhadap kemapanan. Isu agama, isu kedaerahan, dan isu keterpinggiran kerap dilantunkan secara harmonis dalam berbagai ritme politik, sehingga kemudian orang terbuai untuk memerhatikan lagunya dan bukan pada susunan nada-nada yang membentuknya. Konsekuensinya, petualang-petualang politik yang cermat membaca kecenderungan rakyat akan mengeksploitasi barang dagangan partai menjadi 'janji surga' yang dapat meninabobokkan para pemilih.

Eksplorasi atas *unconsciousness* ini berbeda secara karakter dengan persuasi logika. Di dalam demokrasi idealnya kekuatan politik teruji melalui berjalannya kompetisi, persuasi, dan pemilihan dengan dasar penguasaan individu dan masyarakat atau yang sering disebut dengan hegemoni atas ruang hampa (Critchley, 2002). Berjalannya mekanisme kekuasaan terhadap kesadaran diri (*self-consciousness*) inilah yang memengaruhi pilihan orang dari akibat adanya persuasi dalam upaya memenangkan kompetisi. Upaya persuasi memang 'ditembakkan' pada ketidaksadaran orang terhadap logika pilihan dan bukan dengan pengeksploitasian terhadap ketidaksadaran yang lebih sering diakibatkan oleh ketidaktahuan orang. Sekali eksploitasi atas *unconsciousness* ini dilakukan, maka terjadi juga pengingkaran atas etika politik dan lebih jauh lagi etika demokrasi.

Tingkat kapabilitas melakukan persuasi inilah yang mendasari individu atau partai politik melenggang ke arena kompetisi (Glaser, 2010; dan Kob, 2010). Politik sebagai aktivitas untuk melakukan penguasaan pengaruh secara tidak langsung menunjukkan adanya pertarungan untuk memperebutkan sesuatu di atau pada ruang hampa. Sekaligus juga menegaskan bahwa orang atau partai dalam kegiatan politik membutuhkan pihak lain yang berusaha dipengaruhinya. Rantai perebutan inilah yang menggiring sejumlah aktor politik menyadari adanya kompetisi yang harus mereka lalui, mulai dari kompetisi di tingkat internal hingga ke arena pertarungan dengan kompetitor eksternal.

Kompetisi tentunya tidak akan menjadi masalah bila masing-masing bersikap ksatria dan berpikir tentang pewujudan persuasi logika untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap ksatria (dalam olahraga dinamai 'sportif') ini secara tidak langsung juga mencerminkan kedewasaan atau kematangan dalam berpolitik. Manuver politik

merupakan sesuatu yang lazim untuk mencapai tujuan, namun apa pun hasil manuver dan kompetisi yang diterjuninya membutuhkan keksatriaan. Dalam bahasa politik sering muncul sebagai “Siap menang dan siap pula kalah”, dalam bahasa kompetisi dimunculkan sebagai “Siap menang dan siap menghargai kemenangan pihak lain”, dan dalam bahasa kedaulatan rakyat disebut sebagai “Siapa pun pemenangnya, yang menang adalah demokrasi.”

Persoalan bisa diunggah dalam pertanyaan tentang sudahkah kompetisi dilakukan secara *fair* atau adil, sesuai aturan yang berlaku, tanpa manipulasi hasil, dan dengan pengadil atau hakim atau ‘tuan kadi’ yang berkredibilitas dan berintegritas (Dwyre dan Frarrarmyers, 2007)? Ranah persoalan etika dalam kompetisi politik pun kerap menyisakan persoalan hingga harus dibawa ke tingkat tertinggi proses pencarian keadilan yang pada intinya mencari “kebenaran” dalam kompetisi ini. Dengan kata lain, kompetisi politik yang tidak adil pada dasarnya melanggar butir etika paling dasar dalam berkompetisi. Pada titik ini, keterlibatan dalam kompetisi yang tidak sesuai aturan dengan sendirinya telah melanggar sejumlah butir etika kompetisi. Lebih lanjut, rekayasa hasil atau manipulasi pencapaian hasil tak sekadar membohongi publik, namun juga merupakan bentuk pengingkaran atas etika politik dan etika demokrasi. Hal terparah tentunya bila kehadiran pengadil dalam kompetisi ini sama sekali tak bisa menjamin adanya *fairness*, sehingga pengadil kompetisi yang sekaligus menjadi pengadil etika dalam kompetisi pada suatu saat harus diadili juga.

Kompetisi langsung kehilangan nafas kompetisinya ketika terjadi pengkhianatan dalam berbagai bentuknya. Apologi umum diberikan dengan berkilah pada penyeberangan kubu suatu hal yang wajar, koalisi sebagai keniscayaan, dan kekuasaan sebagai tujuan utama (Sinema, 2009). Dalam hal ini pengkhianatan internal cenderung didamaikan meskipun tetap akan menyisakan kekesalan terpendam secara psikis, sedangkan pembentukan koalisi dan pencapaian tujuan kekuasaan harus dibaca secara lebih cermat. Bila dan hanya bila arah koalisi telah dinyatakan secara tegas dari awal, pengkhianatan dapat dipandang tidak ada. Pilihan publik telah disadari sedari awal, termasuk kemungkinan pembentukan kerjasama kekuatan. Namun bila koalisi terbentuk sebagai upaya pengamanan hasil dan kekuatan belaka, tanggung jawab etika

terhadap pemilih atau pendukung awal pada dasarnya telah diingkari. Kompetisi putaran *Kedua* atau kompetisi putaran *Ketiga* menjadi tak berarti ketika hasil putaran *Pertama* dinisbikan begitu saja tanpa ketegasan sedari awal.

Sirnanya nafas kompetisi inilah yang bila kepentingan salah satu pihak kemudian menjadi terancam, maka politik “kekanak-kanakan” cenderung kuat akan muncul. Bongkar membongkar *frozen bad deal* dipastikan terjadi saat seseorang terancam tergelincir dari puncak atap ke lantai dasar. Di satu sisi hal ini memberi hasil baik dengan terbongkarnya secara tuntas sebuah perkara yang awalnya berusaha dirahasiakan. Publik pun dapat bereaksi dengan geleng-geleng kepala tak mengerti, marah dan memaki, menuntut pengusutan tuntas, atau semakin apatis. Di sisi sebaliknya, hal seperti ini menunjukkan rapuhnya pondasi politik yang mestinya terbangun atas dasar *trust* di kalangan publik. Hal terbaik, tentunya, tidak ada pencapaian tujuan dengan cara yang salah sehingga tidak ada yang harus dirahasiakan. Pada gilirannya, tidak perlu juga saling ancam bila salah satu dari mereka harus terganggu kepentingannya. Patut dicatat, terdapat kecenderungan yang menunjukkan diadakannya upaya pembekuan atau pengaburan bila bongkar muat kasus semacam ini dipandang membahayakan kepentingan yang lebih besar.

Kompetisi yang tidak sehat biasanya disertai dengan pembentukan kubu-kubu yang bisa jadi juga beroperasi secara tidak sehat. Perkubuan ini tersusun selain karena faktor kesamaan pandangan dan relasi, juga dapat diciptakan karena adanya transaksi janji. Dalam satu kubu, transaksi janji ini meliputi hubungan antara dukungan dan pendanaan, antara dukungan dan posisi, dan/atau antara dukungan dan janji-janji berikutnya. Persoalan melebar ketika dukungan telah diperoleh di satu pihak dan transaksi harus dipenuhi di pihak lain. Tekanan psikis hutang budi atau tagih janji inilah yang kerap memunculkan persoalan etika dalam berpolitik. Hal yang jelas, pengelabuhan atas *public trust* bisa jadi terpaksa harus dilakukan demi dan karena hutang budi yang harus dibayar balik atau karena pihak pemberi dukungan menagih janji. Layaknya orang yang terbebani, tuntutan terdekat serta tuntutan aktuallah yang kemudian didahulukan dan menganggap kepentingan publik dapat dikesampingkan terlebih dahulu.



Memang tak bisa dipungkiri, kehidupan sebuah negara tentu terjalin karena adanya kesepakatan atas janji-janji dan persuasi janji-janji yang diberikan. Bangunan yang terbentuk atas kesepakatan dan persuasi janji ini salah satunya merupakan hasil dari terjadinya transaksi informasi sebagai cermin dari berlangsungnya suatu proses komunikasi, termasuk komunikasi dengan *new media*. Dalam hal proses komunikasi yang dilangsungkan memiliki dampak politik, orang kemudian mengenalnya dengan komunikasi politik; sama halnya dengan bila proses komunikasi berdampak sosial kemudian orang lebih mengenalnya dengan komunikasi sosial.

Inti dari beragam proses komunikasi dengan segala macam dampaknya ini tak lain adalah kontribusi aktivitas komunikasi dalam menciptakan struktur kekuasaan, menentukan bentuk relasi, dan memengaruhi kadar *right to communication* dan kadar *freedom of expression* dalam relasi struktur kekuasaan. Sering dipahami, model tindakan komunikatif (*communicative model of action*) dan model tindakan ekspresif (*expressive model of action*) merupakan sumber daya sosial yang bersifat unik yang dihasilkan dari tindakan komunikasi. Dengan pemahaman ini, berdasar kontribusinya, pendorongan terhadap sumber kekuasaan lain (*power over*) cenderung lebih memungkinkan terjadinya persoalan keamanan daripada penciptaan relasi seimbang dalam aktivitas komunikasi atau *power to* (Berlin, 1990; dan Stewart, 2001).

Dalam hubungannya dengan penggunaan *new media*, persoalan keamanan dari kontribusi komunikasi dalam penciptaan struktur kekuasaan ini dapat dipahami dari dua hal. *Pertama*, secara normatif, keberadaan *new media* memungkinkan dua model kekuasaan yang disampaikan oleh Stewart di atas berlangsung. *Power to* memungkinkan aktor-aktor dalam proses komunikasi melalui *new media* membangun relasi secara seimbang, bersifat interaktif, dan saling menguntungkan satu sama lain. *Power over* memungkinkan aktor-aktor dalam proses komunikasi melalui *new media* justru menimbulkan relasi tidak seimbang sehingga kekuasaan yang tercipta hanya menguntungkan salah satu pihak. Relasi yang tidak seimbang inilah yang lebih sering memunculkan persoalan keamanan, termasuk yang diakibatkan oleh pengabaian etika dalam berkomunikasi dengan menggunakan *new media* (Lumby dan Probyn, 2004; Drushel dan German, 2011; dan Ryberg dan Corlett, 2010).

*Kedua*, jika tindakan komunikatif dipahami sebagai sebuah prinsip sosialisasi yang menjadi medium integrasi sosial dan sebagai proses reproduksi sosial simbolik, maka kekuasaan sebagai tindakan komunikatif menjadi inti dari keseluruhan proses perkembangan kesepakatan sosial. Kekuasaan ini juga menjadi dasar dari rasionalitas moderen karena model sistem kehidupan modern memahami modernitas sebagai proses rasionalisasi terstruktur terhadap ketidaksamaan perkembangan interaksi yang melahirkan norma dan subsistem rasional yang hendak dicapai. Namun dalam kenyataannya, model tindakan yang muncul dan dimiliki oleh aktor komunikasi jarang atau tidak mampu mewujudkan dalam tindakan komunikatif.

Dua hal di atas menegaskan betapa sulitnya komunikasi dijalankan tanpa menimbulkan persoalan keamanan bila etika dalam *ber-new media* pun tak bisa ditegakkan. Setidaknya, persoalan keamanan bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas komunikasi dan transaksi informasi akan mengembalikan pemahaman komunikasi ke pemahaman awal sekadar sebagai proses penyusunan, penyampaian, dan penerimaan pesan yang mengandung arti (McQail dan Windahl, 1995) dan bukan ke pemahaman komunikasi sebagai upaya saling memahami (Prajarto, 2010). Dengan kata lain, tindakan komunikasi *ber-new media* yang cenderung menekankan pada proses komunikasi lebih potensial dalam menghadirkan ancaman keamanan daripada komunikasi dengan *new media* yang menginginkan terjalin dan terhormatinya pemahaman bersama. Hal ini akan semakin terlihat bila aktivitas komunikasi *ber-new media* justru digunakan untuk melakukan atau mencapai tujuan eksploitasi *unconsciousness*.

*Pertama*, persoalan keamanan akan muncul pada sisi komunikator dan sisi komunikan yang menggunakan *new media*. Ketidaknyamanan muncul dan kekhawatiran atas keamanan menyertai setiap kali kegagalan mereka mengikuti perkembangan *new media* terjadi (Warschauer, 2004; Solomon, Allen, dan Rest, 2002; dan Mossberger, Tolbert, dan Stansbury, 2003). Persoalan etika atas keamanan terjadi saat pihak produsen *new media* bersikap abai terhadap resiko ekonomi dan resiko sosial dari tindakan komunikasi *ber-new media* yang digiringnya. Demi sukses pemasaran produk dan layanan *new media*, tekanan dalam kompetisi, dan peredaran produk di pasar gelap kerap mengabaikan unsur etika

dalam menghadirkan sesuatu yang baru bagi konsumen, *namely* etika pendidikan konsumen *new media*.

Problem keamanan ini akan menghebat saat *pressure* secara sadar dilakukan oleh sumber komunikasi (komunikator atau komunikan secara bergantian karena sifat interaktif *new media*). *Pressure* lepas etika inilah yang akan memojokkan salah satu pihak hingga kemudian di antara mereka diselimuti ketidaknyamanan untuk melanjutkan komunikasi (Manovich, 2002; dan Levinson, 2009). Dominasi sumber komunikasi dalam *ber-new media*, entah karena tidak sadar atau karena tidak tahu atau karena tidak mau tahu, merefleksikan realitas di dalam masyarakat antara mereka yang akut bergantung pada *new media* dan mereka yang kebas karena tak berdaya terhadap sensitivitas tusukan *new media*. Berapa banyak masyarakat yang, sebagai contoh, terganggu oleh banjir pesan yang tidak mereka kehendaki dan tidak mereka harapkan? Berapa banyak masyarakat, contoh lain, yang menganggap pesan dalam komunikasi *ber-new media* adalah suatu kebenaran sehingga kehati-hatian menjadi tertindih? Konsekuensinya, ketika kehati-hatian memudar, pesan dipandang sebagai kebenaran, selektivitas penggunaan terkesampingkan, dan *pressure* terus menerus datang, maka justru rasa tidak amanlah yang nampak mengemuka dan memudahkan berlangsungnya dominasi baru.

Problem keamanan *ber-new media* juga dipastikan muncul saat kepemilikan dan akses terhadap teknologi *new media* berjalan secara tidak seimbang. Eksklusivitas yang demikian bukanlah sesuatu yang salah dari sisi *property*, namun akan menjadi sebuah persoalan dalam mencapai tahap saling memahami karena, sekali lagi, komunikasi harus 'terbanting' ke sekadar sebuah proses penyusunan, penyampaian, dan penerimaan pesan belaka. *New media* sebagai produk teknologi yang bersifat menghadirkan kebaruan untuk memudahkan justru menempatkan proses komunikasi kembali pada paham mekanis yang tak akan menghasilkan efektivitas dalam berkomunikasi (Benvenuto dan Zorzi, 2011; dan McQuail dan Windahl, 1995).

*Kedua*, kejang-kejang keamanan *new media* dihadirkan oleh konten yang terklasifikasi sebagai kurang bertanggung jawab karena ketidaksesuaian sasaran. Kesalahan umum yang berlaku, baik dari sisi penggagas konten, pemerhati, serta regulator konten, terletak pada penyamarataan atas konten dan bukan pada klasifikasi sasaran konten.

Mengambil hal yang sudah dilakukan pada dunia film, klasifikasi *new media* dengan basis konten –baik tertulis, gambar, atau apapun– dapat kemudian dibuat untuk alasan perlindungan, keamanan, dan terselenggaranya etika. Klasifikasi berbasis konten telah menunjukkan adanya kesadaran etika atas kelayakan informasi sehingga arus informasi yang dialirkan sumber komunikasi tidak dapat dipandang sebagai ancaman bagi penerima informasi (Schroeder, 2009; dan Handley dan Chapman, 2010).

Persoalannya memang, kembali terletak pada formalisasi registrasi untuk mengaksesnya, yang dapat dilakukan dengan identitas yang kurang terkontrol atau bahkan dengan pemalsuan identitas. Arti sesungguhnya, petualang-petualang akses sendirilah yang sebenarnya ingin masuk ke sebuah wilayah tidak aman dengan berbagai alasan yang mereka buat. Sebagai contoh, situs pornografi terdaftar pada umumnya telah menentukan sejumlah persyaratan, terkait dengan Undang-Undang yang berlaku di negara tertentu, cara mendapatkan kode akses, jenis konten, dan peringatan atas isi kontennya. Etika bisnis untuk prosedur layanan secara profesional telah dilakukan. Persoalan muncul ketika individu yang tidak memenuhi syarat mencoba mengakses dengan secara sengaja memberi informasi yang salah. Hal yang hampir sama, contoh lain, terjadi ketika beredar SMS dengan isi negatif. Dalam hal ini persoalan tidak terletak pada perusahaan penyedia jasa layanan SMS, tetapi kembali lagi pada orang yang dengan sengaja memberi data atau informasi palsu agar bisa menggunakan jasa layanan SMS secara semena-mena atau memang dengan tujuan yang buruk.

Persoalan di atas secara sederhana dapat disamakan dengan niatan baik sejumlah industri yang berusaha melakukan pendidikan pada konsumennya. Perusahaan atau industri hasil tembakau, baik secara terpaksa, dipaksa, atau atas kesadaran sendiri, telah memberikan *warning* pada konsumennya tentang bahaya mengisap rokok. Perusahaan farmasi atau obat-obatan secara simpatik telah menunjukkan batas penggunaan obat dan menyarankan untuk pergi ke dokter bila reaksi tubuh atas obat tak segera membuat sembuh atau bebas dari sakit. Produsen makanan dan minuman melakukan hal yang mirip dengan menunjukkan tanggal

kadaluarsa agar produknya tetap layak dikonsumsi.<sup>3</sup> Keamanan dalam mengonsumsi menjadi persoalan bila orang mengisap rokok secara berlebihan, menelan obat melebihi takaran, atau menelan makanan yang sudah tidak layak hingga menimbulkan keracunan. Keamanan juga tidak terjamin saat rokok yang mestinya diisap malah dimakan layaknya makanan dan obat yang mestinya ditelan malah ditumbuk dan dijadikan campuran minuman. Persoalan keamanan dimunculkan oleh kesalahan penggunaan dan tidak semestinya bila dibebankan pada produsennya, karena masing-masing industri sudah menunjukkan jenis produk yang ditawarkannya ke masyarakat secara jelas. Persamaan contoh ini lebih untuk menunjukkan bahwa persoalan keamanan kembali tidak dapat dijamin lebih-lebih bila sudah berada di area pengguna itu sendiri.

*Ketiga*, persoalan keamanan dari aktivitas komunikasi ber-*new media* memang dapat muncul bila penyelenggaraan layanan *new media* tidak atau kurang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab (Curran dan Seaton, 2009; dan Aburdene, 2007). Reputasi penyelenggara *new media* mutlak dipertaruhkan bila kekurangan profesional dimunculkan, meskipun harus diakui kalau ketidaksempurnaan ini muncul kasus per kasus dan tidak generik. Contoh kasus, *message* yang dikirim A kepada B nampak menjadi ajaib ketika B menerima pesan itu dari Z sementara Z tidak mengakui itu, A meyakini kalau itu *message*-nya, A tidak saling kenal dengan Z, dan B dapat menunjukkan bahwa pesan A itu diterimanya dari Z. Dalam kasus nyata ini A kemudian merasa tidak aman untuk mengirimkan *message* lagi, apalagi untuk pengiriman jenis pesan yang bersifat pribadi. Dengan kata lain, ketidakprofesionalan penyelenggaraan –sekali lagi bersifat kasuistik– berpeluang pula untuk menimbulkan rasa tidak aman.

Persoalan keamanan akan terlihat semakin terbuka bila etika politik dan etika ber-*new media* tidak terselenggara baik saat dunia politik dan dunia *new media* berjalan menjadi satu. Bahkan penerabasan etika dengan memanfaatkan *new media* dapat saja dilakukan untuk tujuan politik tertentu. Malfungsi *new media* inilah yang di satu sisi dapat berakibat baik, membongkar kasus sebagai misal, dan di sisi lain bisa

---

<sup>3</sup> Layanan informasi semacam ini pada dasarnya merupakan imbauan untuk tidak mengonsumsi secara berlebihan.

berakibat pada ketidaknyamanan dan ketidakamanan pihak lain. Lebih parahnya, ketidakdewasaan sikap pun ditopengi dengan alasan adanya demasivikasi dari *new media*.

### **Etika dan Keamanan**

Meskipun tak bisa dijanjikan, keamanan di dalam politik dan *new media* bukan suatu hal yang tak bisa diupayakan. Beberapa langkah taktis bisa diajukan untuk menghadirkan keamanan dalam berpolitik dan berkomunikasi dengan *new media*. *Pertama*, secara nyata perlu menumbuhkan kesadaran individual bahwa di *Kedua* dunia ini memang masalah keamanan tak ada penjaminnya (Shostack dan Stewart, 2008; Landau, 2011; dan Magnet dan Gates, 2009). Semua sisi memiliki daya tusuk dan daya ancam yang dapat menyebabkan ketidakamanan posisi dan keberlanjutannya. Jika etika tak menyertai keprofesionalitasan pihak lain, ketidakamanan adalah keniscayaan. Sama dan sebangun, jika etika dan keprofesionalitasan tak dikukuhkan dalam bertindak, maka kehadiran diri pun memicu rasa tidak aman bagi pihak lain.

Dengan menyadari bahwa masalah keamanan bukan terjamin dengan sendirinya, individu akan dipaksa untuk memproteksi diri atau menyiapkan perisai sedari awal saat dia mulai bersentuhan dengan politik atau berkomunikasi dengan *new media*. Prinsip pengembangan etika di sini dimulai dengan penanaman benih untuk tidak mengganggu keamanan pihak lain bila tidak ingin keamanannya juga diganggu. Penyertaannya tentu dilakukan dengan mengubah dari eksploitasi *unconsciousness* ke persuasi logika.

*Kedua*, meskipun secara nyata *new media* memiliki daya jangkau yang luas, karakter personifikasi *new media* yang cenderung mengubah bentuk komunikasi ke arah komunikasi antarpersona harus disiasati dengan pengetatan dalam registrasi formal (Howard dan Prince, 2010). Persoalan mungkin muncul akibat perubahan kebijakan yang bisa jadi dibaca sebagai pembatasan dan dipandang tidak efektif dan menyulitkan, namun letak mendasar persoalan harus ditegakkan pada aturan yang harus dijaga. Rantai kerja terorisme akan lebih mudah dilacak, penyebar SMS 'fitnah' atau kriminalitas pesan singkat lebih gampang disergap, dan konten *new media* yang tak sebangun dengan 'nilai-nilai budaya bangsa' lebih mudah diingatkan, bila registrasi tak sekadar memenuhi

persyaratan formal, namun memang dilakukan untuk pendataan yang bertanggung jawab.

Formula penanganan pada dasarnya tak berubah, yakni semakin banyak pihak yang terlibat akan semakin sulit pengendalian dilakukan. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, identitas diri lain semacam *passport*, serta Surat Ijin Mengemudi, sebagai contoh, yang pada dasarnya merupakan bentuk registrasi pemegangnya dan harus dilakukan oleh instansi berwenang pun dalam kenyataannya masih menyisakan persoalan duplikasi, pemalsuan, dan penyalahgunaan pemakaiannya. Apalagi jika, seperti yang terjadi dalam formalisasi registrasi akses *new media*, kemungkinan untuk mendaftarkannya terdistribusi secara luas tanpa keketatan yang sewajarnya. Dengan kata lain, persetujuan untuk mengakses *new media* perlu diberikan bila dan hanya bila verifikasi terhadap data telah dilakukan secara teliti. Artinya juga, segala bentuk persoalan keamanan yang nantinya bisa muncul akan lebih mudah dicari penanggungjawabnya.

*Ketiga*, keamanan posisi politik dan keamanan penggunaan *new media* pada dasarnya dapat ditingkatkan bila individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, tidak melakukan kesesatan awal yang bermuara pada hutang budi, *mute action*, atau kesesatan lebih jauh sebagai pemantik ketidakamanan. Dengan kata lain, ketidakamanan terjadi kadang-kadang, kalau tidak bisa dikatakan biasanya atau sering kali, justru karena orang men-drive dirinya sendiri menuju pada posisi tidak aman. Jebakan ketidakamanan sistemik ini yang sedari awal harus ditegaskan untuk tidak dimasuki secara sembrono atau atas dasar jiwa petualang. Perkecualian atau konsesi apa pun tak layak diberikan, kecuali orang secara sadar memilih untuk berbuat salah dan memang berniat menjajal kekebalan hukum dirinya yang sebenarnya tak dimiliki siapa pun.

Pilihan untuk berpendapat, bersikap, dan berperilaku beda secara naluriah dan alamiah memang membutuhkan keberanian tersendiri, termasuk keberanian dan kesadaran untuk memenuhi tanggung jawab dan sanksinya. Dalam hal ini 'maling berjubah dewa'-lah yang kerap menghadirkan jebakan bagi pemula di bidang politik atau mereka yang terjun dalam *new media*. Sekali lagi, eksploitasi *unconsciousness* di atas persuasi logika dapat menyebabkan ketertindihan informasi dan

keterlemparan diri ke wilayah abu-abu; sebuah wilayah penciri politik dan aktivitas *new media*. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa potensi ketidakamanan terbesar pada dasarnya melekat pada mereka yang terjebak pada suatu kesesatan di wilayah yang memang tidak memberi jaminan keamanan. Jika ini tidak disadari sedari awal, maka ketertatihan diri terhadap fitnah, upaya saling menjatuhkan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan pembunuhan karakter akan tetap terpublikasi dari orang-orang yang kaget pada ketidakamanan. \*\*\*\*\*



## Daftar Pustaka

- Aburdene, Patricia. (2010). *Megatrends 2010: The Rise of Conscious Capitalism*. Charlottesville, Vi: Hampton Roads Publishing.
- Benvenuto, Nevio dan Michele Zorzi. (2011). *Principles of Communications Networks and Systems*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Clancy, Robert. (2011). 'Ethics of Democracy.' Terarsip di [http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert\\_ethics-of-democracy.html](http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert_ethics-of-democracy.html) dan diakses tanggal 14 Juni 2011.
- Critchley, Simon. (2002). 'Ethics, Politics and Radical Democracy - The History of a Disagreement.' *Culture Machine*, Vol 4. Terarsip di <http://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/viewArticle/267/252> dan diakses tanggal 14 Juni 2011.
- Critchley, Simon. (2008). *Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance*. New York, NY: Verso.
- Curran, James dan Jean Seaton. (2009). *Power Without Responsibility: Press, Broadcasting and the Internet in Britain*. London: Routledge.
- Day, Louis A. (2005). *Ethics in Media Communications: Cases and Controversies*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing
- Dushel, Bruce E. dan Kathleen German. (2011). *Ethics of Emerging Media: Information, Social Norms, and New Media Technology*. London: Continuum.
- Duggan, Lisa. (2004). *The Twilight of Equality: Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy*. Boston, MA: Beacon Press.

- Dwyre, Diana dan Victoria a Farramyers. (2007). *Limits and Loopholes: The Quest for Money, Free Speech, and Fair Elections*. Wasgington DC: CQ Press.
- Ess, Charles. (2009). *Digital Media Ethics*. Cambridge: Polity.
- Frantzich, Stephen E. (2008). *Citizen Democracy: Political Activism in a Cynical Age*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers
- Glaser, Charles L. (2010). *Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Cooperation*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Green, Stuart P. (2007). *Lying, Cheating, and Stealing: A Moral Theory of White-Collar Crime*. Cary, NC: Oxford University Press, USA.
- Gutmann, Amy dan Dennis F. Thopmson. (2005). *Ethics and Politics: Cases and Comments*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
- Handley, Ann dan C.C. Chapman. (2010). *Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Herreros, Fransisco. (2007). *The Problem of Forming Social Capital: Why Trust?* Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Hetherington, Marc J. (2006). *Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Howard, Doug dan Prince. (2010). *Security 2020: Reduce Security Risks This Decade*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Koß, Michael. (2010). *The Politics of Party Funding: State Funding to Political Parties and Party Competition in Western Europe*. Cary, NC: Oxford University Press.

- Landau, Susan. (2011). *Surveillance or Security?: The Risks Posed by New Wiretapping Technologies*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Levinson, Paul. (2009). *New New Media*. Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Lumby, Catharine dan Elspeth Probyn. (2004). *Remote Control: New Media, New Ethics*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Magnet, Shoshana dan Kelly Gates. (2009). *The New Media of Surveillance*. London: Routledge.
- Manovich, Lev. (2002). *The Language of New Media*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- McQuail, Denis dan Sven Windahl. (1995). *Communication Models: For the Study of Mass Communications*. Essex: Longman Group United Kingdom.
- Mossberger, Karen, Caroline J. Tolbert, dan Mary Stansbury. (2003). *Virtual Inequality: Beyond the Digital Divide*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Niebuhr, Reinhold. (2002). *Moral Man and Immoral Society: A Study of Ethics and Politics*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press
- Prajarto, Nunung. (2010). *Psikologi Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Fisipol UGM.
- Rexroth, Thomas. (2003). *Trust or Consequences: Exposing Hidden Political Agendas*. Bloomington, IN: AuthorHouse.
- Ryberg, Jesper dan J. Angelo Corlett. (2010). *Punishment and Ethics: New Perspectives*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

- Schroeder, Franziska. (2009). *Performing Technology: User Content and the New Digital Media: Insights from the 2009 Symposium*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Shapiro, Ian. (2004). *The Moral Foundations of Politics*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Shostack, Adam dan Andrew Stewart. (2008). *The New School of Information Security*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional.
- Sinema, Kyrsten dan Janet Napolitano. (2009). *Unite and Conquer: How to Build Coalitions That Win and Last*. San Fransisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.
- Sirianni, Carmen. (2009). *Investing in Democracy: Engaging Citizens in Collaborative Governance*. Washington, DC: Brookings Institution Press
- Solomon, Gwen, Nancy Allen, dan Paul Resta. (2002). *Toward Digital Equity: Bridging the Divide in Education*. Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Svara, James H. (2006). *The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Organizations*. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Warschauer, Mark. (2004). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Wilkins, Lee dan Clifford G. Christians. (2008). *The Handbook of Mass Media Ethics*. London: Routledge
- Williams, Christopher R. dan Bruce A. Arrigo. (2007). *Ethics, Crime and Criminal Justice*. London: Prentice Hall.